

Berita : Pengelolaan Keuangan Tak Optimal
Entitas / Cakupan : BPK
Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi : Kamis, 29 Maret 2018

Pengelolaan Keuangan Tak Optimal

Pemkot Bandung Diminta Tak Hanya Mengejar WTP

BANDUNG, (PR).-

Ada banyak hal yang lebih penting bagi Pemerintah Kota Bandung daripada sekadar mendapatkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan pemkot selama ini dinilai masih jauh dari optimal.

Opini WTP atas laporan keuangan merupakan target yang jauh-jauh hari ditetapkan Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan pasangan Ridwan Kamil dan Oded M Danial. Selalu gagal dalam tiga tahun sebelumnya, tahun ini merupakan tahun terakhir pembuktian target tersebut.

"Opini WTP itu hanya satu dari sekian ukuran pengelolaan anggaran yang baik, terutama dilihat dari sisi

akuntansi, sisi pencatatan. Opini WTP belum bicara jauh tentang transparansi dan efisiensi pengelolaan," tutur Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif Donny Setiawan, Rabu (28/3/2018).

Menurut Donny, kerja Pemkot Bandung dalam mendorong transparansi dan efisiensi pengelolaan anggaran belum optimal. Ia menyebutkan, pemkot tidak membuka akses bagi warga untuk terlibat sejak awal dalam penganggaran, meski mengklaim telah menerapkan sistem *e-budgeting*.

Efisiensi pengelolaan anggaran juga patut dipertanyakan dengan temuan sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) selama beberapa tahun terakhir yang mencapai angka rata-rata Rp 700 miliar per tahun. Sisa anggaran ini bukan diperoleh dari penghematan, tapi dari tidak optimalnya perencanaan dan pemanfaatan.

"Dengan silpa yang besar ini, apakah pemkot nantinya bisa mendapatkan opini WTP? Ya bisa saja. Karena memang opini ini lebih ke urusan

tertib pencatatan. Bahkan ada kan pemda yang dapat WTP tapi tidak menjamin bersih dari praktik buruk, seperti korupsi," katanya.

Donny mengapresiasi target opini WTP yang dipatok Pemkot Bandung. Namun ia juga berharap agar pemkot semakin serius memperbaiki sistem pengelolaan anggaran. Kerja perbaikan ini yang mestinya dilakukan secara konsisten.

"Jadi mendapatkan opini WTP itu baik. Tetapi itu bukan segalanya. Masih banyak pekerjaan penting untuk Pemkot Bandung," katanya.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Bandung Muhamad Solihin menyatakan, keberhasilan pemkot mendapatkan opini WTP sangat tergantung pada kerja keras seluruh perangkat daerah. Bukan hanya kerja satu institusi. Solihin mencontohkan terkait pengelolaan aset.

"Penertiban aset bukan hanya tugas BPKA (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset), tetapi tim di tiap-tiap instansi juga memiliki tugas untuk men-

dukung itu. Jika itu dilakukan, kita bisa dapat WTP tahun ini," tutur Solihin dalam rapat evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017.

Selain kerja sama lintas instansi, Solihin juga menekankan pentingnya penyesuaian anggaran. Tidak salah jika pemkot memiliki optimisme, tetapi ia meminta agar pemkot tidak terlalu ambisius dalam membelanjakan anggaran. Harapannya, seluruh kegiatan belanja tidak lagi melebihi kapasitas pendapatan.

"Jangan seperti kota lain yang terlalu optimistis sehingga belanja daerahnya melebihi pendapatan. Itu jelas karena kesalahan manajemen. Jika dibiarkan, sebuah kota bisa bangkrut," katanya.

Solihin berharap, Pemkot Bandung lebih realistis dalam menetapkan target pendapatan dan lebih cermat dalam menjalankan program. Dengan kebijakan ini, belanja daerah bisa lebih efisien. **(Tri Joko Her Riadi)*****